

BAB II

HUBUNGAN ANTARA AS - TIONGKOK DAN TEKNOLOGI 5G

2.1 Sejarah Hubungan Antara Tiongkok dan AS

Hubungan AS dan Tiongkok memiliki tensi yang tinggi yang berawal dari perbedaan segi pandang politik dan geopolitik serta persaingan di dunia teknologi yang mana berpengaruh kepada ekonomi masing-masing negara membuat kedua negara adidaya ini terus berusaha untuk membalap satu sama lain, kerjasama antar negara dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu kesamaan diantara kedua negara tersebut. Setelah perang dingin, AS beserta negara-negara barat memanfaatkan Tiongkok karena menjadi sumber tenaga kerja berketerampilan dengan harga yang murah demi memajukan sektor industri menengah kebawah yang mana pihak dari negara-negara barat melakukan kendali ekspor ketatserta memfasilitasi Tiongkok ke dalam sistem ekonomi global dan rantai nilai industri dengan harapan bahwa Tiongkok akan maju sesuai dengan apa yang mereka harapkan (Sun, 2018).

Menurut David Shambaugh dalam bukunya yang berjudul *The Beautiful Imperialist*, Tiongkok memiliki sikap yang *ambivalent* atau mendua kepada AS yang mana menjelaskan kedua belah negara ini memiliki “*Love and hate relationship*” semenjak masa perang dunia ke II, perang dingin, serta peristiwa 911, dilihat dari rekam jejak semenjak periode pendekatan kembali antara Mao Zedong dengan presiden AS Richard Nixon posisi kedua negara memiliki pasang surut yang tak kunjung reda. Akan tetapi kedua negara tersebut saling mengakui posisi satu sama lain dalam segi politik global, namun AS selalu menganggap bahwa menjalin

hubungan dengan Cina merupakan suatu langkah yang memiliki maksud tersendiri atau bisa disebut sebagai *engagement and containment* (Shambaugh, 2021).

Para peneliti menilai hubungan AS dengan Tiongkok memiliki pasang surut yang berawal dari perbedaan ideologi serta geopolitik membuat kedua negara ini menjadi kedua negara besar tersebut memiliki tujuan yang berbeda, pada pertengahan 1990 para peneliti dari barat memperdebatkan bahwa dengan berakhirnya perang dingin antara AS dengan Rusia akan terjadi kekuasaan yang kosong di Asia Timur sehingga dapat memicu rasa nasionalisme di Tiongkok sehingga memungkinkan terjadinya konflik regional (Buzan & Segal, 1994).

Dari kekosongan tersebut para peneliti barat beranggapan bahwa Tiongkok memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara adidaya yang berawal dari negara yang lemah, hal ini dibuktikan dengan perkembangan ekonomi Tiongkok yang berubah pesat semakin maju serta militer Tiongkok yang terbukti sudah setara dengan AS menjadikan Tiongkok sebagai negara yang dianggap sebagai pesaing oleh AS (Xiaoping, 1982).

Akan tetapi dalam sejarah nya hubungan AS dengan Tiongkok telah berjalan sebelum negara Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada Oktober 1949 yang mana berawal dari hubungan perdagangan yang mana kapal AS pertama kalinya dikirimkan ke Tiongkok yang bernama *Empress of China* pada tahun 1748 yang mana kapal tersebut dikirim dari AS dengan tujuan konsul tak resmi, sehingga kerja sama terus terjalin sampai tahun 1760 dan perdagangan dilakukan di Guangzhou yang mana dipenuhi oleh para pedagang-pedagang yang berlisensi dengan produk yang di perjual belikan yaitu meliputi teh, sutra dan porselen yang mana membuat kedua negara ini memiliki hubungan bilateral yang cukup baik sehingga membuat AS membuka kedutaan besarnya di Tiongkok tepatnya di Guangzhou selama hampir dua dekade

yang mana perwakilan dari AS ditempatkan di ibu kota setelah implementasi perjanjian kedutaan luar negeri Taijin pada tahun 1862 (Wasserstorm, 2007).

Hubungan AS dengan Tiongkok di uji dengan didirikannya Republik Rakyat Tiongkok yang di pimpin oleh Mao Zedong pada tahun 1949 yang mana pada saat itu menjabat sebagai pemimpin komunis Tiongkok dengan merebut kekuasaan Chiang Kai Shek selaku pemimpin ketua partai nasionalis Tiongkok yang membuat Chiang Kai Shek beserta pasukannya bersembunyi di Taiwan akan tetapi pada tahun 1953 parta nasionalis Tiongkok berusaha untuk menaklukan daratan Tiongkok sehingga terjadinya krisis selat Taiwan tidak bisa dihindari dan AS memberi bantuan kepada Taiwan yang mana menunjukkan bahwa hubungannya dengan Tiongkok pada saat itu berada di titik kritis, pada tahun 1955 pemerintah AS berkomitmen untuk membantu Taiwan dalam hal ini dan menegur Tiongkok agar tidak melakukan perlawanan yang pada akhirnya hal ini ditetapkan dalam Resolusi Formosa (Medeiros, 2019).

Setelah penetapan Resolusi Formosa hubungan AS dengan Tiongkok mengalami kebekuan dalam bidang bilateral serta perdagangan akan tetapi pada tanggal 6 April 1971 tim ping-pong Tiongkok memberi undangan kepada tim ping-pong AS beserta sejumlah wartawan dan hal tersebut menjadi awal titik balik hubungan AS dengan Tiongkok yang mana setelah undangan tersebut PBB mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok dan mengembalikan kursi dewan yang tadinya ditempati oleh Chiang Khai Shek, hal ini berdampak baik semenjak presiden AS pada saat itu Jimmy Carter memberikan pengakuan secara diplomatik penuh kepada Republik Rakyat Tiongkok serta mengakui *One China's policy* pada tahun 1979 (Council on Foreign Affairs Organization, 2020).

Setahun kemudian pada saat presiden AS dijabat oleh Richard Nixon pada saat itu Richard Nixon melakukan kunjungan ke Tiongkok selama delapan hari dan ari

kunjungannya tersebut kedua negara membentuk kerja sama yang dinamakan *Shanghai Communique*, yang mana bertujuan untuk menjadi wadah dari kedua negara untuk membahas tentang isu-isu krusial yang terjadi di dunia dan bagaimana kedua negara selaku negara yang besar dapat menanggulangi isu-isu tersebut seperti contoh isu kedaulatan Taiwan dan dari kerja sama tersebut memiliki tujuan untuk mempererat tali kerja sama diantara kedua negara (Xuetong, 2010).

Akan tetapi hubungan keduanya kembali membeku dikarenakan pada saat musim semi 1989 masyarakat Tiongkok mengadakan demo di Tiananmen dalam skala besar dengan tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan reformasi demokrasi secara keseluruhan dan mengatasi adanya tindak laku korupsi yang sedang marak, pada 3 Juni 1989 pemerintah Tiongkok menurunkan aparat militer untuk membubarkan aksi demo yang tengah berjalan dan menghilangkan ratusan nyawa para demonstran. Menanggapi hal ini, pihak pemerintah AS menahan kerja sama militer yang terjalin dengan Tiongkok serta semenjak itu hubungan keduanya membeku (Medeiros, 2019).

Dari hubungan kedua negara yang pasang surut, selama ini pemerintah AS mengawasi perkembangan Tiongkok di bidang ekonomi dan militernya dalam laporan *Quadrennial Defense Review Report* dikatakan bahwa kemajuan Tiongkok memiliki potensi dalam menjadikan AS sebagai kompetitor tunggalnya, Condoleezza Rice selaku sekretaris AS pada masa pemerintahan George Bush mengatakan bahwa dalam segi apapun Tiongkok merupakan kompetitor AS yang strategis serta maupun adanya kerja sama yang dijalin diantara kedua negara Tiongkok masih lawan yang potensial untuk AS sendiri meskipun kekuatan militer Tiongkok belum sekuat AS akan tetapi hal itu tidak akan permanen (Rice, 2001).

Menurut Rice Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan yang memiliki kepentingan sendiri seperti isu Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur dan perkembangan militer Tiongkok merupakan interpretasi dari terganggunya Tiongkok karena adanya peran besar AS di Asia Pasifik, dengan kata lain Tiongkok hadir sebagai kekuatan penyeimbang di Asia, dengan kata lain bahwa hubungan keduanya lebih cocok bila dikatakan sebagai kompetitor strategis dibandingkan rekan strategis dan hal ini diperkuat dengan terjalinnya kerja sama antara Tiongkok dengan Iran dalam hal teknologi rudal balistik (Rice, 2001).

Dalam survey *Harris Poll* menunjukkan bahwa mayoritas negara di Eropa selaku responden melihat Tiongkok sebagai ancaman stabilitas global dan dari pihak AS, hasil responden sebanyak 31% memandang bahwa Tiongkok sebagai ancaman terbesar dunia dan 54% percaya bahwa kehadiran Tiongkok dapat mendominasi dunia melebihi Iran dan Korea Utara serta masyarakat AS percaya bahwa besarnya investasi Tiongkok yang masuk kedalam negaranya berpotensi untuk membuat Tiongkok menjadi negara yang super power dan berpotensi menjadi ancaman dari keamanan negaranya sendiri dan dalam hal ini George Bush berkata bahwa hal ini merupakan bagian dari *Axis of Evil* (Ipsos Reid, 2005).

Hubungan keduanya semakin kompleks dikarenakan Tiongkok membuat kebijakan *Active Defense* yang merupakan postur pertahanan diri dari segala ancaman dari kepentingan yang di implementasikan dengan mempertajam dan memperkuat keamanan lingkungannya guna mencegah pihak lain yang hendak melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan Tiongkok, kebijakan ini dilakukan dengan perluasan strategi yang didasarkan pada *White Defense Paper 2019* yaitu : 1) menjaga

kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan dari pembangunan nasional; 2) menjaga keselarasan dan stabilitas sosial; 3) mempercepat modernisasi dan pertahanan nasional; 4) menjaga perdamaian dan stabilitas dunia (Department of Defense, 2010).

2.2 Hubungan Tiongkok dan AS Di Bidang Politik

Dengan adanya tensi tersebut, kedua negara bertemu tepatnya di Nusa Dua kabupaten Badung Bali pada tanggal 9 Juli 2022 yang mana di wakikan oleh kedua menteri luar negeri dari kedua negara yaitu Anthony Blinken dan Wang Yi demi membahas terkait berbagai isu yang mana Blinken berpendapat bahwa hubungan AS dan Tiongkok memiliki konsekuensi yang besar bagi kedua negara serta bagi dunia maka dari pertemuan itu kedua belah pihak setuju untuk memiliki hubungan yang saling kompetitif dan bertanggung jawab melalui jalur diplomasi, akan tetapi dalam pertemuan tersebut kedua negara memiliki beberapa ketidak samaan dari berbagai isu perihal Taiwan, Hong Kong, Tibet, dan Xin Jiang serta terkait perang dagang yang sedang terjadi diantara kedua negara tersebut. Wang Yi berpendapat dari sudut pandang Tiongkok bahwa AS seharusnya membatalkan tarif tambahan yang dikenakan terhadap setiap produk impor Cina serta Wang meminta kepada AS agar mencabut setiap sanksi unilateral yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok (Saputra, 2022).

Dari beberapa hal isu, Anthony Blinken dan Wang Yi pula membahas terkait isu perang yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina, dari percakapan tersebut Blinken memberikan kritik terhadap hubungan Tiongkok dan Rusia yang mana Blinken mengutarakan bahwa dalam percakapan tersebut pihak Tiongkok tidak menunjukkan adanya kenetralan dari konflik Rusia-Ukraina yang sedang berkecamuk, dengan

adanya tensi diantara kedua negara serta keterpihakan Tiongkok dengan Rusia serta Taiwan, Menteri Pertahanan Tiongkok yaitu Wei Fenghe bahwa seharusnya hubungan kedua negara antara AS dan Tiongkok perlu diperbaiki kembali dikarenakan posisi keduanya sedang berada di dalam masa yang krisis di waktu yang bersamaan, Wei Fenghe pula berpendapat bahwa AS sudah beberapa kali berusaha untuk memecahkan hubungan Tiongkok dengan yang lain dengan mengatakan bahwa Tiongkok mencoba mengambil alih keamanan negara lainnya (Iuc, CNBC Indonesia, 2022).

Pada saat setiap negara mencari cara untuk memulihkan perekonomian di tengah Covid-19, ketegangan AS dan Tiongkok memperoleh perhatian yang cukup banyak dikarenakan selama hampir dua tahun terakhir di tahun 2020 lingkup perdagangan dunia sudah tertekan karena terjadinya perang dagang diantara kedua negara tersebut dan hal itu tidak kunjung reda justru menjalar ke hal-hal lain seperti dinamika aksi massa di Hong Kong, muslim Uighur serta kemerdekaan Taiwan. Kanselir Jerman, Angela Merkel berpendapat bahwa polemik AS dan Tiongkok membuat para negara cenderung bingung bagaimana untuk bersikap dan mengutamakan kepentingan masing-masing, kondisi ini dikhawatirkan dapat memecah konsentrasi persatuan global dan dari perpecahan tersebut sangat dikhawatirkan apabila tensi AS dan Tiongkok dapat mewujudkan perang dingin 2.0 (Koestanto, 2020).

Tensi yang belum mereda ini membuat AS mengecam Tiongkok karena memutuskan tali kerja sama bilateral di berbagai sektor penting seperti perubahan iklim, dan upaya anti narkoba, menurut juru bicara dewan keamanan AS tindakan Tiongkok dalam tidak terlibat di berbagai sektor penting merupakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab sebagai negara adidaya ternama, sementara menurut juru

bicara menteri luar negeri Tiongkok Hua Chunying Beijing juga menanggukkan kerjasama dengan AS terkait imigran ilegal, bantuan resmi dalam isu kriminal, serta kejahatan transnasional. Pemutusan kerjasama ini dilakukan karena adanya imbas buruk disaat kunjungan ketua Dewan Perwakilan Rakyat As Nancy Pelosi di Taiwan yang mana membuat Beijing memberikan anggapan bahwa kunjungan tersebut merupakan latihan militer yang mengepung Taiwan (CNN , 2022).

Jake Sullivan selaku penasihat kewan nasional berpendapat bahwa strategi kebijakan luar negeri sementara dari Joe Biden merupakan kebijakan yang tepat untuk melihat Tiongkok saat ini, kebijakan tersebut menyebutkan bahwa Tiongkok yang sekarang menjadi satu-satunya pesaing AS yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan sektor ekonomi, militer, diplomatik, dan teknologi yang terus menerus menjadi penantang kekuatan global yang stabil dan terbuka (Marcus, 2021).

Menteri pertahanan Tiongkok, Wei Fenghe pada pertemuan keamanan Asia di Shangri-La menuturkan bahwa Tiongkok tidak pernah bertindak sebagai agresor melainkan hanya mencari kedamaian serta stabilitas dalam skala global yang merata, pada 11 Juni 2022, Wei Fenghe menjelaskan bahwa Tiongkok menolak keras tuduhan bahkan ancaman dari pidato menteri pertahanan AS Lloyd Austin dengan berkata bahwa hubungan bilateral diantara AS dan Tiongkok tidak akan membaik apabila pihak AS tidak segera berhenti mencoreng nama baik Tiongkok, serta berhenti untuk mengambil tindakan dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Hal ini dikarenakan Austin berujar bahwa adanya peningkatan yang sangat mengkhawatirkan serta berpotensi tidak aman dan tidak profesional antara pesawat dan kapal-kapal Tiongkok di negara-negara lain. Di satu sisi invasi Rusia kepada Ukraina menjadi pusat perhatian pada pertemuan tersebut dan disaat itu Wei menegaskan bahwa

Tiongkok mendukung pembicaraan damai dan menentang penyediaan senjata serta penekanan maksimum (kompas, 2022).

Pada tanggal 14 November 2022 di Bali Indonesia, saat acara G20 Presiden AS yaitu Joe Biden dan presiden Tiongkok Xi Jinping serta membahas perihal isu-isu besar yang tengah terjadi di dunia internasional seperti perubahan iklim, stabilitas global ekonomi makro termasuk pembebasan hutang, ketahanan pangan global, serta keamanan kesehatan. Dari hasil pertemuan tersebut kedua belah pihak sangat antusias dalam menjalankan peran mereka sebagai kedua negara yang memiliki keahlian dalam membantu negara-negara lain, hal ini diperjelas oleh presiden AS yaitu Joe Biden dengan berpendapat bahwa AS dan Tiongkok dapat berbagi tanggung jawab tanpa melihat perbedaan serta tidak berkompetisi satu sama lain demi bekerja sama dalam isu global dan hal ini disambut baik oleh presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping dengan berpendapat bahwa kedua belah pihak telah menemukan langkah yang tepat untuk menjalin kerja sama bilateral dan langkah kerja sama ini merupakan langkah yang baik untuk dimulai (China Briefing Team, 2022).

Akan tetapi pertemuan tersebut membahas pula perihal perkembangan ekonomi Tiongkok, isu Taiwan, serta keamanan regional dan hal tersebut menjadi kunci dalam kerja sama ini dan demi berjalannya kerja sama antara AS dan Tiongkok presiden Joe Biden memberi kepastian demi kerja sama tersebut berjalan dengan lancar yaitu tidak akan melihat peluang untuk mengganti sistem Tiongkok, tidak akan memulai perang dingin dengan Tiongkok, tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan tidak mencari konflik akan isu tersebut, serta tidak memutuskan tali kerja sama dengan Tiongkok ataupun menghalangi perkembangan ekonomi Tiongkok (Council on foreign Relations, 2022).

2.3 Hubungan Tiongkok dan AS Di Bidang Keamanan

Hubungan Tiongkok dengan AS dalam bidang keamanan merupakan hubungan yang ambigu dikarenakan keduanya melakukan kerja sama sekaligus berkompetisi satu sama lain yang mana keduanya berperan aktif hal ini dikarenakan perbedaan dari segala aspek yang mana membuat hubungan dari kedua negara ini sangatlah kompleks yang mana meskipun keduanya menjalin kerja sama keduanya pula menjadi kompetitor satu sama lain dan dikarenakan kedua negara merupakan negara super power menjadikan hubungan kedua negara tersebut lebih natural, hal ini dibuktikan pada tahun 2021 yang mana hubungan kedua negara tidak membaik meskipun terjadinya transisi presiden AS dari Donald Trump hingga Joe Biden (Medeiros, 2019).

Selama beberapa dekade hubungan keduanya terjalin dalam menjaga keamanan dunia, akan tetapi dari setiap kerja sama keduanya terlihat terjalin konflik di kesempatan waktu yang berdekatan seperti contoh AS dan sekutunya mengecam Tiongkok perihal isu HAM di Taiwan dan statusnya, modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok, serta permasalahan maritim yang dipercaya oleh Tiongkok merupakan wilayah sah Tiongkok. AS dan beberapa negara melakukan kerja sama dengan berfokus kepada isu-isu regional dan mayoritas sekutu AS merupakan korban dari permasalahan regional yang diberikan oleh Tiongkok seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Filipina dan Tiongkok sudah melakukan tekanan yang konsisten yaitu dengan membatalkan kerja sama dengan Jepang di bidang ekonomi, dan mempermasalahkan Korea Selatan dalam memilih sistem pertahanan misil dari AS di tahun 2016 (Glaser, 2017).

Hal ini dibuktikan pada Januari 2021 pada saat itu Joe Biden menyerukan boikot terhadap olimpiade musim dingin Beijing yang akan diselenggarakan pada

Februari mendatang dan berkata bahwa pihak Washington tidak akan menghadiri acara tersebut yang mana di ikuti oleh negara-negara yang menjalin kerja sama dengan AS, fokus AS dalam boikot tersebut merupakan tindakan keras Tiongkok terhadap minoritas muslim Uyghur di wilayah Xinjiang serta pembungkaman pers dan aksi massa Hong Kong yang mana berujung dengan pihak Beijing meningkatkan represi terhadap para aktivis dan media pers independen Hong Kong akan tetapi pada 20 Januari 2021 presiden Joe Biden berpendapat bahwa hubungan AS Tiongkok perlu pembaharuan ke arah yang lebih positif dengan mengubah apa yang pihak administrasi Trump lakukan sebelumnya (Rahn, 2022).

Dengan adanya tensi tersebut, kedua negara bertemu tepatnya di Nusa Dua kabupaten Badung Bali pada tanggal 9 Juli 2022 yang mana di wakikan oleh kedua menteri luar negeri dari kedua negara yaitu Anthony Blinken dan Wang Yi demi membahas terkait berbagai isu yang mana Blinken berpendapat bahwa hubungan AS dan Tiongkok memiliki konsekuensi yang besar bagi kedua negara serta bagi dunia maka dari pertemuan itu kedua belah pihak setuju untuk memiliki hubungan yang saling kompetitif dan bertanggung jawab melalui jalur diplomasi, akan tetapi dalam pertemuan tersebut kedua negara memiliki beberapa ketidak samaan dari berbagai isu perihal Taiwan, Hong Kong, Tibet, dan Xin Jiang serta terkait perang dagang yang sedang terjadi diantara kedua negara tersebut.

Wang Yi berpendapat dari sudut pandang Tiongkok bahwa AS seharusnya membatalkan tarif tambahan yang dikenakan terhadap setiap produk impor Cina serta Wang meminta kepada AS agar mencabut setiap sanksi unilateral yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok (Saputra, 2022).

Dari beberapa hal isu, Anthony Blinken dan Wang Yi pula membahas terkait isu perang yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina, dari percakapan tersebut Blinken

memberikan kritik terhadap hubungan Tiongkok dan Rusia yang mana Blinken mengutarakan bahwa dalam percakapan tersebut pihak Tiongkok tidak menunjukkan adanya kenetralan dari konflik Rusia-Ukraina yang sedang berkecamuk, dengan adanya tensi diantara kedua negara serta keterpihakan Tiongkok dengan Rusia serta Taiwan, Menteri Pertahanan Tiongkok yaitu Wei Fenghe bahwa seharusnya hubungan kedua negara antara AS dan Tiongkok perlu diperbaiki kembali dikarenakan posisi keduanya sedang berada di dalam masa yang krisis di waktu yang bersamaan, Wei Fenghe pula berpendapat bahwa AS sudah beberapa kali berusaha untuk memecahkan hubungan Tiongkok dengan yang lain dengan mengatakan bahwa Tiongkok mencoba mengambil alih keamanan negara lainnya (Iuc, CNBC Indonesia, 2022).

Pada saat pidato di sesi pertemuan umum PBB yang ke-77 tanggal 24 September 2022 di New York, pada pidatonya Wang Yi berkata bahwa disaat permasalahan perihal Covid-19 sudah selesai Tiongkok siap berperan besar dalam melakukan kerja sama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, mengejar perkembangan dan menghapuskan kemiskinan, dan demi hal-hal tersebut terjadi kerja sama harus terus terjalin dan meningkan serta meninggalkan perbedaan yang ada, Wang Yi pula berpendapat bahwa Tiongkok merupakan negara yang siap untuk membantu negara lain dan Tiongkok bukanlah musuh ataupun aggressor dikarenakan Tiongkok sudah membantu banyak dalam perkembangan dunia (Ministry of Foreign Affairs of The People's of Republic of China, 2022).

Wang Yi pula berkata bahwa meskipun perbedaan kerap terjadi antara hubungan Tiongkok dengan negara lain, namun perbedaan tersebut bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan dapat mengganggu kerja sama bilateral dalam menanggulangi

isu-isu seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, serta meningkatkan kerja sama multilateral dalam bantuan ekonomi dan militer (Ministry of Foreign Affairs of The People's of Republic of China, 2022).

Akan tetapi meskipun Wang Yi berpidato bahwa Tiongkok bukanlah aggressor dari setiap isu, Tiongkok mengalami beberapa kecaman dari pihak AS sendiri dikarenakan isu-isu regional di Tiongkok sendiri yang menyimpang dari hak asasi manusia seperti Hong Kong, Taiwan, dan Xinjiang ataupun kemajuan di bidang teknologi Tiongkok dalam pengembangan 5G beserta modernisasi militer berpotensi dapat menjadikan Tiongkok sebagai ancaman global di dunia (Rahn, 2022).

Hal ini pertama kali diutarakan oleh Lloyd Austin selaku menteri pertahanan AS yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan internal Tiongkok tidak profesional serta adanya peningkatan yang sangat mengkhawatirkan serta berpotensi tidak aman bagi negara lain, Lloyd Austin berpendapat bahwa peningkatan Tiongkok bukanlah hal yang biasa dengan berkata bahwa adanya kepentingang yang tersembunyi dibalik perkembangan-perkembangan tersebut seperti ekonomi, militer, teknologi dan diplomasi yang mana secara bersamaan meningkat dan hal ini dikecam oleh Weng Feihe yang mana berkata bahwa hubungan AS dengan Tiongkok tidak akan membaik apabila pihak AS tidak berhenti ikut campur dengan internal Tiongkok ataupun tidak berhenti mengawasi perkembangan internal Tiongkok (kompas, 2022).

Pada tanggal 14 November 2022 saat acara G20 diadakan, presiden AS yaitu Joe Biden bertemu presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping dan pertemuan tersebut membahas pula perihal perkembangan ekonomi Tiongkok, isu Taiwan, serta keamanan regional dan hal tersebut menjadi kunci dalam kerja sama ini dan demi berjalannya kerja sama antara AS dan Tiongkok presiden Joe Biden memberi kepastian demi kerja sama tersebut berjalan dengan lancar yaitu tidak akan melihat

peluang untuk mengganti sistem Tiongkok, tidak akan memulai perang dingin dengan Tiongkok, tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan tidak mencari konflik akan isu tersebut, serta tidak memutus tali kerja sama dengan Tiongkok ataupun menghalangi perkembangan ekonomi Tiongkok (Council on foreign Relations, 2022).

2.4 Persaingan Tiongkok dan AS Di Bidang Teknologi

Pada tahun 2008 disaat AS beserta Eropa mengalami krisis finansial, Tiongkok pada saat itu berbanding terbalik yang mana pada saat krisis finansial Tiongkok memiliki ekonomi yang stabil sehingga Tiongkok dapat memajukan sektor teknologi dan ilmu pengetahuan yang mana membuat perusahaan-perusahaan informasi dan teknologi negara-negara barat merasa tersaing dengan perusahaan-perusahaan informasi dan teknologi Tiongkok. AS pada masa kepresidenan Obama telah melakukan berbagai tindakan demi mempersempit langkah Tiongkok guna mencegah Tiongkok dalam berinvestasi di perusahaan semi konduktor serta memperketat masuknya akses teknologi Tiongkok ke dalam AS dengan iklan komersil, saat masa Trump menjabat sebagai presiden melihat teknologi Tiongkok berkembang pesat membuat Trump melihat teknologi Tiongkok sebagai suatu pelanggaran keamanan yang mana membuat Trump untuk mengeluarkan kebijakan serta melakukan pengetatan suplai produk yang disebabkan oleh Trump yang melihat bahwa potensi produk Huawei 5G dari Tiongkok dapat menjadi suatu dobrakan sehingga persaingan tidak dapat terhindarkan (Zhaokui, 2019).

Dibalik semua upaya pencegahan yang telah dilakukan AS kepada Tiongkok, pihak administrasi Trump berupaya untuk terus mengundur rencana Tiongkok tentang kebijakan industri yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang disebut sebagai "*Made in China 2025*" dengan memberikan sanksi-sanksi kepada industri teknologi

Tiongkok yang ternama, kebijakan industri tersebut menjadi kunci utama Tiongkok untuk menjadi gardu terdepan dalam era globalisasi yang semakin maju. (Executive Office of The President, 2017).

Disaat yang bersamaan, Trump memperbaharui kebijakan pengetatan rantai produk pada penyebaran teknologi 5G yang sedang di kembangkan, pembaharuan tersebut melalui *Export Control Reform Act* (ECRA) pada tahun 2018 yang mana bertujuan untuk berfokus kepada menggagalkan rencana Tiongkok di bidang memajukan teknologi dan informasi dengan cara mempersempit sudut pandang dengan berkata bahwa kemajuan militer, kemajuan ekonomi dan teknologi Tiongkok tidak akan berhasil apabila tidak disebabkan oleh pemberian akses dari kemajuan inovasi AS di bidang-bidang tersebut. (The White House, 2018).

Hal ini membuat Departemen pertahanan nasional, Departemen pendidikan, Departemen kehakiman AS melakukan pengetatan dengan melakukan pemeriksaan aplikasi visa kepada warga negara yang berasal dari Tiongkok serta melakukan pengawasan terhadap para personel yang bekerja di perusahaan teknologi Tiongkok demi terpantaunya mobilisasi perkembangan teknologi Tiongkok, hal ini diperjelas oleh pihak administrasi Trump dengan berpendapat bahwa hal tersebut demi mengurangi potensi pencurian yang akan terjadi di bidang ekonomi dari warga negara yang dianggap sebagai intelijen dari pihak Tiongkok dan dari pengetatan visa pihak administrasi Trump pula menjelaskan bahwa adanya perencanaan untuk melakukan pengetatan visa kepada para pelajar terutama sarjana dalam bidang tertentu atau bahkan melarang agar tidak terjadi adanya pencurian informasi di bidang intelektual dan disebarkan kepada negara-negara kompetitor AS (Priestap, 2018).

Akan tetapi dari segala hal yang sudah terjadi, Tiongkok berjanji akan membalas semua ini kepada Amerika Serikat dengan menjatuhkan harga produk mereka di pasar

Internasional dan mengancam bahwa perang saham akan terulang kembali namun dengan janji bahwa Tiongkok yang akan memegang saham dengan untung besar sehingga angka penjualan akan besar pula seimbang dengan kualitas sang produk (BBC News, 2019).

Meskipun banyaknya haluan yang mengarah kepada Tiongkok dalam bidang ekonomi, Tiongkok sangat mengarahkan dan terus menerobos dengan penuh inovasi demi mencapai target modal agar dapat terciptanya 5G tidak terlalu rumit dikarenakan sanksi-sanksi yang diberikan, meskipun sanksi dan larangan tetap diberikan untuk memberhentikan Tiongkok dalam memproduksi 5G akan tetapi Tiongkok tetap membangun dan mengembangkan teknologi-teknologi yang dapat dijual di pasar bebas dan tidak hanya itu, Tiongkok pula mendapat tunjangan bantuan dari beberapa negara besar yang mana sudah menjadi rekan lama di bidang manufaktur teknologi (CNBC Tech News, 2020).

Melihat bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang masih bergantung kepada negara lain sebagai investor dalam bidang teknologi, pihak administrasi Trump melakukan pencegahan di bidang ekonomi, politik dan yudisial bahkan secara diplomatik demi memperketat pergerakan perusahaan-perusahaan Tiongkok di bidang teknologi dan informasi dan situasi tersebut diprediksikan tidak akan berubah dalam jangka waktu yang pendek. Dalam mempersiapkan hal tersebut AS telah membentuk jaringan regulasi domestik guna pengetatan dapat berhasil di laksanakan, sebagai contoh administrasi Trump telah melarang perusahaan-perusahaan Tiongkok yang maju di bidang teknologi seperti Huawei masuk ke pasar AS dengan alasan demi keamanan nasional AS, melarang agen federal mendapatkan layanan video pengawasan ataupun peralatan telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tiongkok termasuk Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, dan Dahua

Technology. Pihak administrasi Trump pula berkata bahwa akan tidak segan-segan memutuskan pasokan inti dari produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan alasan melanggar peraturan seperti kontrol ekspor pada Mei 2019 (McCain, 2018).

Dari persaingan teknologi yang sudah berjalan beberapa tahun, tentu perusahaan-perusahaan Tiongkok menjadi dampak dari renggangnya hubungan AS dan Tiongkok, dengan berjalannya pengetatan yang dilakukan kepada Tiongkok pihak administrasi Trump pun berfokus untuk menjustifikasi investasi dalam bidang keamanan nasional dengan beberapa objek teknologi terbaru seperti *cyberspace* dan *artificial intelligence* (AI) guna membantu strategi instabilitas secara global. Hal ini di buktikan pada Februari 2019 presiden Trump menanda tangani perintah eksekutif perihal “*American AI Initiative*” dan menjelaskan tentang mempersiapkan *Department of Defense Artificial Intelligence Strategy* (DoD AI) dan hal ini cukup menjelaskan bahwa alasan Trump membentuk perintah eksekutif tersebut guna bersaing dengan negara-negara lain termasuk Tiongkok di bidang teknologi (Work, 2019).

Ditengah persaingan teknologi AS dengan Tiongkok, AS pula membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri yang mana tidak ada Huawei di dalamnya yang mana anggotanya dibagi dengan *Founding & Full Member* dengan total 60 perusahaan dan *Contributing member* yang beranggotakan 24 perusahaan, aliansi ini bernama *Next G Alliance* yang menjadi langkah AS untuk menandingi teknologi Huawei 5G dari Tiongkok (Next G Alliance, 2022).

Dari *Next G Alliance* pihak AS mengimplementasikan *OPEN RAN* atau *Open Radio Access Network*, teknologi *OPEN RAN* merupakan teknologi yang dapat

mengintegrasikan semua teknologi baik itu 2G, 3G, 4G, 5G dalam satu server yang tidak terikat pada suatu merk (Maulani, 2021).

Hal ini diperjelas oleh menteri luar negeri AS yaitu Michel R. Pompeo bahwa ada program yang akan di inisiasi dari AS melewati *Next G Alliance* yaitu *The Clean Network* yang mana dengan tujuan yaitu menekankan *Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cable, Clean Cloud* dan *Clean Path* (U.S Department of State, 2021).

2.4.1 Profil Singkat Huawei

Huawei Technologies Co., Ltd. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok. Perusahaan merancang, mengembangkan dan menjual peralatan telekomunikasi dan elektronik konsumen. Didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei, mantan wakil komandan Tentara Pembebasan Rakyat, perusahaan ini awalnya berfokus pada produksi sakelar telepon, dan kemudian berkembang menjadi produksi jaringan telekomunikasi, menyediakan layanan konsultasi dan operasional serta peralatan untuk perusahaan domestik dan asing serta peralatan manufaktur, komunikasi untuk pasar ritel. Pada Desember 2019, Huawei memiliki lebih dari 194.000 karyawan. Huawei menyediakan produk dan layanan di lebih dari 170 negara. Pada tahun 2012, perusahaan ini menyalip Ericsson menjadi pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, dan pada tahun 2018 menyalip Apple untuk menjadi pembuat smartphone terbesar kedua di dunia setelah Samsung Electronics. (Zhong, 2019).

Walaupun sukses secara internasional, Huawei mengalami kesulitan di sejumlah pasar, karena adanya dugaan dukungan negara yang tidak adil, keterkaitan dengan Tentara Pembebasan Rakyat, dan kekhawatiran keamanan siber terutama dari

pemerintah Amerika Serikat bahwa peralatan infrastruktur buatan Huawei dapat memungkinkan pengawasan oleh Pemerintah Tiongkok Dengan berkembangnya jaringan nirkabel 5G. ada permintaan dari Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak mengadakan bisnis apapun dengan Huawei maupun perusahaan telekomunikasi lain asal Tiongkok, seperti ZTE. Huawei kemudian berpendapat bahwa produknya "tidak memiliki risiko keamanan siber lebih besar" daripada produk perusahaan lain, dan tidak ada bukti mengenai klaim spionase dari Amerika Serikat. Namun pertanyaan mengenai kepemilikan dan kendali Huawei, serta kekhawatiran mengenai seberapa besar dukungan negara kepada Huawei pun tetap muncul. Huawei juga dituduh membantu pengawasan dan detensi massal suku Uyghur di kamp pendidikan ulang, yang akhirnya menyebabkan sanksi dari Departemen luar Negeri AS. Huawei menguji kecerdasan buatan pengenalan wajah yang dapat mengenali ciri fisik khas dari sejumlah etnis untuk mengingatkan instansi pemerintah mengenai orang dari etnis tertentu (Kharpal, 2020).

Berawal dari memproduksi telepon switch, Huawei mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyediakan jasa konsultasi dan operasional serta peralatan khususnya kepada mitra di dalam Tiongkok maupun di luar Tiongkok, pada Desember 2019 Huawei berhasil memperkerjakan 194.000 pekerja demi mencapai target yang maksimal (Corporate Introduction, 2020).

2.4.2 Masuknya Huawei Di Amerika Serikat

Sejauh ini Huawei memiliki mitra dalam menyediakan produk dan jasanya berjumlah lebih dari 170 negara dan dalam hal ini Huawei mengalami masa transisi yang baik dalam beberapa tahun, seperti pada tahun 2012 Huawei telah berhasil memenangkan persaingan dari Ericsson sebagai produsen dalam bidang

telekomunikasi terbesar di dunia, hal ini disusul oleh tersalipnya Apple dalam persaingan produsen terbesar kedua di dunia dalam bidang *smartphone* oleh Huawei di tahun 2018 serta pada tahun 2020 Huawei kembali menjadi sorotan dengan menyalip Samsung dan Apple dalam posisi *smartphone* terbaik di dunia dikarenakan adanya penurunan penjualan dari Samsung serta Apple dikarenakan terjadinya pandemic Covid-19. Meskipun Huawei memenangkan persaingan akan tetapi berdasarkan dari Catalyst, Huawei beruntung memenangkan persaingan ini karena adanya pandemic serta produk Samsung masih kurang tersebar di Tiongkok. Mengingat bahwa Huawei masih memiliki masalah dalam penolakan *smartphone* sebesar 5% akan tetapi Samsung menyentuh 30% karena kurangnya ekspansi ditambah lagi dengan munculnya pandemi (Pham, 2020).

Awal masuk nya huawei di AS dikarenakan berhasilnya Huawei dalam menjadi produsen dalam bidang telekomunikasi di dunia, hal ini membuat Huawei berhasil menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi lainnya di berbagai penjuru dunia dalam berperan menjadi produksi jaringan telekomunikasi, menyediakan layanan konsultasi dan operasional serta peralatan untuk perusahaan domestik dan asing serta peralatan manufaktur, komunikasi untuk pasar ritel (Zhong, 2019).

Dikarenakan perkembangan produk yang berkembang dengan zaman serta prospek Huawei yang memiliki kemajuan membuat Huawei berhasil bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya serta membangun perusahaan di negara lain dan tidak sedikit perusahaan-perusahaan teknologi AS yang menjalin mitra dengan Huawei selaku produsen *software* seperti *Google, Intel, Qualcomm* dan *Broadcom*, hal ini dikarenakan Huawei memberikan produk yang lebih menjanjikan dalam hal telekomunikasi *software* yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan teknologi ternama seperti *Samsung* dan *Apple* yaitu dalam melakukan pengembangan fitur aplikasi yang ada dalam produk *hardware* mereka serta Huawei mampu menambahkan fitur-fitur yang membantu ketertarikan para pembeli dari perusahaan-perusahaan yang menjalin kerja sama dengan Huawei (BBC News, 2019).

Sebagai perusahaan multinasional perusahaan Huawei perlu bantuan dari mitra perusahaan-perusahaan teknologinya dikarenakan Huawei melakukan kerja sama dengan perusahaan lain dengan melakukan jasa pengembangan fitur dan penjualan telekomunikasi, akan tetapi dikarenakan chip yang sudah mulai menipis Huawei perlu adanya chip mentah dari mitranya dan hal ini diperjelas dari majalah finansial *Caixin* memberikan laporan yang berisi bagaimana Huawei sangat bergantung kepada teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika seperti *Cadence Design Systems Inc* dan *Synopsis Inc* yang mana memang perusahaan-perusahaan tersebut merupakan sebuah contoh teknologi yang mutakhir dan mendahului beberapa langkah dari perusahaan yg lain (VOA News Reporter, 2020).

Penipisan chip ini terjadi dikarenakan menjadi resiko dalam kebijakan Trump untuk memblokir masuknya Huawei ke pasar Amerika Serikat, mengingat bahwa Tiongkok merupakan negara yang adidaya dalam bidang ekonominya dan Huawei berbasis 5G merupakan terobosan baru yang dapat menggoyahkan pasar Internasional (Lairson, 2020).

2.4.3 Respon Pemerintah AS Terhadap Masuknya Huawei

Pada bulan Mei, sebuah surat keputusan eksekutif yang mengarah kepada Huawei yang ditanda tangani oleh presiden Amerika Serikat mengumumkan pelarangan teknologi Huawei masuk ke atmosfer pasar AS dan mendeklarasikan hal tersebut sebagai “*national emergency*” dan memblokir perusahaan-perusahaan yang

hendak bekerja sama dengan perusahaan luar dalam bidang teknologi karena dianggap sebagai sebuah resiko yang tidak bisa diterima pada bidang perlindungan nasional Amerika Serikat (BBC News, 2020).

Pihak Amerika Serikat bersikap khawatir dan terjaga dengan berpendapat bahwa teknologi 5G dari Huawei bisa jadi sebuah rancangan yang mana digunakan oleh Tiongkok untuk dijadikan alat mata-mata dan dikarenakan kemampuan 5G yang baru dapat mengganggu komunikasi serta pertahanan nasional, mengingat bahwa CEO dari Huawei Ren Zhengfei merupakan mantan militer Tiongkok yang bertugas selama 9 tahun lamanya sampai pada tahun 1983, dan secara historis Ren Zhengfei merupakan anggota aktif dari Partai Komunis Tiongkok. Pendapat tersebut dikatakan tidak relevan, akan tetapi tidak hanya AS yang khawatir dengan kejadian ini, Australia, New Zealand merupakan rekan kerjasama Amerika Serikat di bidang teknologi berbasis cip dan Amerika Serikat memperingatkan mereka tentang resiko yang akan datang di masa depan apabila mereka memperbolehkan Huawei masuk ke ranah pasar, hal itu berlaku pula dengan Inggris yang mana berpendapat bahwa menggunakan teknologi Huawei dapat merusak tali kerjasama antara Inggris dan Amerika Serikat, Amerika Serikat memperingati Inggris dengan berpendapat bahwa keputusan tersebut akan mengganggu tali kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara tersebut (Business Reporter BBC News, 2020).

Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang datangnya Huawei ke pergerakan pasar Amerika. Dengan kata lain bahwa rekan, pembeli, dan suppliers dari produk teknologi Huawei harus mendapatkan izin resmi dari bidang departemen ekonomi dan pasar Amerika Serikat untuk tetap menyelenggarakan bisnis dengan Huawei. Setelah itu perusahaan Google pula menghapus penggunaan aplikasinya seperti Gmail dan Google maps di dalam

aplikasi *smartphone* Huawei dan tidak hanya *Google*, perusahaan chip Amerika Serikat seperti *Intel*, *Qualcomm*, *Broadcom* memberitahu para pekerjanya bahwa mereka akan memutus tali hubungan dengan Huawei (BBC News, 2019).

Trump merespon hal ini dengan berpendapat bahwa Amerika tidak akan bekerja sama dalam bisnis seperti ini, karena adanya Huawei di permukaan pasar yang mengancam AS di bidang ekonomi, Trump berkata bahwa AS akan menjalankan bisnisnya sendiri dengan cara lama dan tradisional dengan memfokuskan apa yang dianggap sebagai potensi dalam pasar AS sehingga perusahaan-perusahaan akan mempunyai bekal untuk melakukan penjualan produknya yang dimulai dari Amerika itu sendiri, singkatnya bahwa AS harus menjadi pencetus utama dibandingkan negara lain dan hal ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat sudah tertinggal beberapa langkah di bidang teknologi pada pasar internasional (Ball, 2019).

Kebijakan pelarangan Huawei mulai diperketat dengan cara memberlakukan pembatasan baru pada beberapa pemasok yang bekerja dengan Huawei seperti pelarangan ekspor barang yang akan digunakan dengan perangkat 5G yang mana membuat pihak Beijing mendesak untuk menghentikan keputusan "penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China dan bekerja lebih keras pada pertukaran ilmiah dan teknologi serta kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara" (CNBC Indonesia, 2021).